



Optimizing the Role of Deputy Regional Heads in Community Service in the Era of Fiscal Constraints

Ambar Purwoko

Cipta Wacana University, Indonesia

Corresponding Author: Ambar Purwoko ambarpurwoko2@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Regional Leadership, Community Service, Strategy, Budget Efficiency, Central Government Support

Received : 16, August

Revised : 30, August

Accepted: 24, September

©2025 Purwoko: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

This study examines regional leadership strategies in championing community service programs under fiscal constraints resulting from budget efficiency policies. Under these conditions, regional governments are required to maintain program continuity while ensuring community needs are met. This study uses a descriptive qualitative approach through case studies, with data collection techniques including in-depth interviews, observation, and document analysis. The results indicate that the primary strategies of regional leadership include advocacy with the central government, strengthening cross-institutional networks, and collaborating with the community as a basis for legitimacy. Central government support has proven to be a vital instrument in maintaining the sustainability of community service programs. These findings emphasize the importance of adaptive and collaborative leadership as key to the success of community service programs amidst budget constraints.

Optimalisasi Peran Wakil Kepala Daerah dalam Pengabdian Masyarakat pada Era Keterbatasan Fiskal

Ambar Purwoko

Cipta Wacana University, Indonesia

Corresponding Author: Ambar Purwoko ambarpurwoko2@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Kepemimpinan Daerah, Pengabdian Masyarakat, Strategi, Efisiensi Anggaran, Dukungan Pemerintah Pusat

Received : 16, August

Revised : 30, August

Accepted: 24, September

©2025 Purwoko: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Penelitian ini membahas strategi kepemimpinan daerah dalam memperjuangkan program pengabdian masyarakat pada situasi keterbatasan fiskal akibat kebijakan efisiensi anggaran. Dalam kondisi tersebut, pemerintah daerah dituntut untuk menjaga kesinambungan program sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi kasus, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi utama kepemimpinan daerah meliputi advokasi ke pemerintah pusat, penguatan jejaring lintas lembaga, serta kolaborasi dengan masyarakat sebagai basis legitimasi. Dukungan pemerintah pusat terbukti menjadi instrumen vital dalam menjaga keberlanjutan program pengabdian. Temuan ini menegaskan pentingnya kepemimpinan adaptif dan kolaboratif sebagai kunci keberhasilan pengabdian masyarakat di tengah keterbatasan anggaran.

PENDAHULUAN

Pengabdian masyarakat merupakan salah satu instrumen penting dalam pembangunan daerah karena berfungsi sebagai sarana pemberdayaan, peningkatan kesejahteraan, dan penguatan partisipasi publik. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan program pengabdian masyarakat dapat berjalan secara berkelanjutan meskipun dihadapkan pada tantangan keterbatasan anggaran. Pada era efisiensi fiskal, banyak program pembangunan dan pengabdian masyarakat mengalami penundaan atau bahkan penghentian, sehingga dibutuhkan strategi kepemimpinan yang inovatif dan adaptif. Kepemimpinan daerah tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai penghubung yang mampu mengintegrasikan kepentingan masyarakat dengan dukungan pemerintah pusat.

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan pengabdian masyarakat sering menghadapi berbagai hambatan, terutama terkait keterbatasan anggaran. Kebijakan efisiensi fiskal yang diterapkan pada level nasional seringkali menuntut daerah untuk melakukan penyesuaian, termasuk pengurangan belanja pada program-program non-prioritas. Kondisi ini berdampak langsung pada keberlanjutan berbagai program pengabdian masyarakat yang membutuhkan dukungan pendanaan konsisten. Di sinilah kepemimpinan daerah diuji, yakni bagaimana seorang kepala daerah atau wakil kepala daerah mampu menjaga kesinambungan program di tengah keterbatasan sumber daya.

Kepemimpinan daerah tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan, melainkan juga sebagai aktor yang memiliki kemampuan untuk bernegosiasi, mengadvokasi, serta memperjuangkan kebutuhan masyarakat ke tingkat yang lebih tinggi, dalam hal ini pemerintah pusat. Dukungan dari pusat menjadi penting karena mampu menutup keterbatasan fiskal di tingkat daerah, sekaligus memastikan program-program pengabdian masyarakat tetap berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan strategi yang tepat, kepemimpinan daerah dapat berperan sebagai jembatan yang menghubungkan kepentingan masyarakat dengan peluang kebijakan di tingkat nasional.

Studi mengenai strategi kepemimpinan daerah dalam memperjuangkan program pengabdian masyarakat di tengah keterbatasan anggaran menjadi relevan karena dapat memberikan gambaran tentang bagaimana peran kepemimpinan adaptif dan kolaboratif dapat diwujudkan dalam praktik nyata. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengisi kekosongan literatur mengenai hubungan antara efisiensi anggaran, kepemimpinan daerah, serta mekanisme dukungan pusat sebagai faktor penentu keberhasilan program pengabdian masyarakat.

Kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan pemerintah sering kali berdampak langsung pada kemampuan daerah dalam menjalankan program pengabdian masyarakat. Kondisi ini menuntut peran kepemimpinan daerah untuk mencari alternatif solusi, salah satunya dengan memperjuangkan program melalui mekanisme dukungan pemerintah pusat. Strategi tersebut tidak hanya menekankan pada aspek advokasi dan diplomasi kebijakan, tetapi juga pada kemampuan membangun jejaring kerja sama lintas sektor. Dengan demikian, pengabdian masyarakat dapat tetap berjalan tanpa mengabaikan prinsip

efisiensi fiskal yang diterapkan secara nasional. Studi mengenai strategi kepemimpinan daerah menjadi relevan untuk memberikan gambaran mengenai praktik-praktik baik dalam menjaga keberlanjutan program pengabdian masyarakat di tengah keterbatasan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran kepemimpinan daerah dalam memperjuangkan program pengabdian masyarakat di tengah keterbatasan anggaran?
2. Strategi apa saja yang digunakan kepemimpinan daerah untuk memperoleh dukungan pemerintah pusat dalam pelaksanaan program pengabdian masyarakat?
3. Sejauh mana efektivitas strategi kepemimpinan daerah dalam menjaga keberlanjutan program pengabdian masyarakat

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a) Memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu administrasi publik, khususnya terkait kepemimpinan daerah dan strategi pengelolaan program pengabdian masyarakat.
 - b) Menjadi referensi akademis bagi penelitian selanjutnya yang berfokus pada hubungan antara efisiensi anggaran, kepemimpinan daerah, dan dukungan pemerintah pusat.
2. Manfaat Praktis
 - a) Memberikan wawasan bagi pemerintah daerah mengenai pentingnya strategi kepemimpinan adaptif dalam menghadapi keterbatasan fiskal.
 - b) Menjadi masukan bagi pemerintah pusat dalam merancang kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan daerah dalam melaksanakan program pengabdian masyarakat.
 - c) Menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat dan pemangku kepentingan lokal untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan program

PELAKSANAAN

Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan pemerintahan daerah dengan fokus pada praktik kepemimpinan dalam memperjuangkan program pengabdian masyarakat. Subjek penelitian adalah pemimpin daerah (khususnya wakil kepala daerah) serta pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan advokasi program ke pemerintah pusat. Penelitian dilakukan dalam rentang waktu tertentu yang memungkinkan peneliti memperoleh data yang mendalam mengenai dinamika strategi kepemimpinan di tengah keterbatasan fiskal.

Kegiatan penelitian mencakup:

1. Identifikasi program pengabdian masyarakat yang terdampak kebijakan efisiensi anggaran.

2. Pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam dengan pejabat daerah, tokoh masyarakat, dan pihak terkait.
3. Observasi langsung terhadap kegiatan pengabdian masyarakat serta upaya advokasi program.
4. Pengumpulan data sekunder berupa dokumen kebijakan, laporan kegiatan, dan arsip pemerintahan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menggali secara mendalam strategi kepemimpinan daerah dalam memperjuangkan keberlanjutan program pengabdian masyarakat.

1. Teknik Pengumpulan Data
 - a. Wawancara mendalam (in-depth interview) dengan wakil kepala daerah, pejabat OPD, tokoh masyarakat, dan mitra kerja pemerintah daerah.
 - b. Observasi partisipatif, yaitu dengan mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat dan advokasi program.
 - c. Studi dokumen, meliputi laporan kegiatan, peraturan, dan catatan resmi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
2. Analisis Data.
Data dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif Miles dan Huberman, yaitu melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Proses ini dilakukan secara berulang hingga diperoleh temuan yang valid dan mendalam.
3. Uji Keabsahan Data.
Untuk menjamin validitas hasil penelitian, dilakukan teknik triangulasi sumber, triangulasi metode, dan pengecekan ulang kepada informan kunci (member check).

HASIL

Penelitian ini menemukan bahwa Kabupaten Kulon Progo, sebagai salah satu daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), menghadapi tantangan khas dalam pelaksanaan program pengabdian masyarakat. Kondisi geografis yang didominasi wilayah perbukitan dan pedesaan menjadikan masyarakat Kulon Progo banyak bergantung pada sektor pertanian, perkebunan, dan usaha kecil menengah (UKM). Di sisi lain, keterbatasan fiskal daerah semakin nyata sejak diterapkannya kebijakan efisiensi anggaran, sehingga banyak program pemberdayaan masyarakat terancam terhambat.

Beberapa hasil utama yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

- a) Dampak Efisiensi Anggaran terhadap Program.
Program-program pengabdian masyarakat yang berorientasi pada penguatan ekonomi lokal, seperti pemberdayaan petani, pelatihan UMKM, dan peningkatan kapasitas masyarakat, mengalami keterbatasan pendanaan. Sejumlah kegiatan harus disesuaikan skalanya, bahkan sebagian ditunda karena keterbatasan dana dari APBD.

- b) Strategi Advokasi Ambar Purwoko Wakil Bupati Kulon Progo. Wakil Bupati menunjukkan peran aktif dalam memperjuangkan keberlanjutan program melalui mekanisme advokasi ke pemerintah pusat. Upaya ini dilakukan dengan menyusun proposal program, membangun komunikasi intensif dengan kementerian terkait, serta memanfaatkan jalur koordinasi formal maupun informal. Hasilnya, beberapa program berhasil memperoleh dukungan dana dari kementerian pertanian, perdagangan, dan desa.
- c) Penguatan Kolaborasi Lintas Sektor. Menghadapi keterbatasan anggaran, pemerintah daerah memperluas jejaring kerja sama dengan sektor swasta dan lembaga non-pemerintah. Misalnya, pengembangan ekonomi kreatif dan pemberdayaan UMKM dilakukan dengan menggandeng perusahaan swasta melalui program CSR. Selain itu, kerja sama dengan perguruan tinggi di Yogyakarta dimanfaatkan untuk memberikan pendampingan teknis dan penelitian terapan.
- d) Partisipasi Masyarakat dan Legitimasi Program. Salah satu kekuatan kepemimpinan daerah di Kulon Progo adalah kemampuannya melibatkan masyarakat dalam setiap tahap program. Melalui forum musyawarah desa, kelompok tani, dan asosiasi UMKM, masyarakat diberikan ruang untuk memberikan masukan dan turut mengawal jalannya program. Hal ini menciptakan legitimasi sosial yang memperkuat posisi pemerintah daerah ketika memperjuangkan dukungan pusat.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi kepemimpinan daerah di Kulon Progo mampu menjembatani keterbatasan anggaran dengan peluang dukungan dari pusat dan sektor lain.

Pertama, strategi advokasi yang dilakukan Wakil Bupati Kulon Progo menegaskan peran kepemimpinan daerah sebagai mediator antara kebutuhan lokal dan kebijakan nasional. Dengan melakukan lobi, komunikasi politik, serta diplomasi program, pemerintah daerah berhasil menunjukkan bahwa pengabdian masyarakat di Kulon Progo relevan dengan agenda pembangunan nasional, seperti penguatan ketahanan pangan, pemberdayaan desa, dan pengembangan ekonomi kreatif.

Kedua, kolaborasi lintas sektor memperlihatkan bahwa pengabdian masyarakat tidak dapat bergantung sepenuhnya pada APBD. Dukungan CSR perusahaan dan pendampingan akademisi memperkaya sumber daya program, baik dari sisi finansial, teknis, maupun inovasi. Hal ini sejalan dengan konsep *collaborative governance*, yang menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta dalam pembangunan daerah.

Ketiga, keterlibatan masyarakat melalui forum partisipatif berfungsi sebagai mekanisme kontrol sekaligus penguatan legitimasi. Keterlibatan ini membuat program lebih sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat, sekaligus meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap program yang dijalankan.

Konsep ini selaras dengan teori pembangunan partisipatif yang menekankan pentingnya peran masyarakat dalam setiap tahap pembangunan.

Dengan demikian, strategi kepemimpinan daerah di Kulon Progo dapat dipahami sebagai perpaduan antara advokasi ke pusat, kolaborasi multi-aktor, dan penguatan legitimasi publik. Ketiga aspek tersebut menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan program pengabdian masyarakat di tengah keterbatasan fiskal. Temuan ini memperlihatkan bahwa meskipun dihadapkan pada efisiensi anggaran, kepemimpinan daerah yang adaptif, inovatif, dan kolaboratif mampu memastikan program pengabdian masyarakat tetap berjalan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan daerah, khususnya di Kabupaten Kulon Progo, memiliki peran sentral dalam menjaga keberlanjutan program pengabdian masyarakat di tengah keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi fiskal. Melalui strategi advokasi ke pemerintah pusat, penguatan jejaring lintas sektor, dan pelibatan aktif masyarakat, Wakil Bupati Kulon Progo mampu memperjuangkan program prioritas agar tetap berjalan.

Temuan penelitian menegaskan tiga hal pokok:

- 1) Advokasi politik dan administratif menjadi instrumen utama untuk memperoleh dukungan pendanaan dari pusat.
- 2) Kolaborasi lintas sektor dengan swasta, akademisi, dan masyarakat sipil memperkaya sumber daya program serta memperkuat legitimasi.
- 3) Partisipasi masyarakat menjadi fondasi keberhasilan karena memastikan program sesuai kebutuhan nyata dan meningkatkan rasa kepemilikan publik.

Dengan demikian, strategi kepemimpinan adaptif dan kolaboratif terbukti efektif sebagai solusi untuk menjaga keberlanjutan program pengabdian masyarakat meskipun dalam kondisi keterbatasan fiskal.

REKOMENDASI

- 1) Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diajukan:
- 2) Bagi Pemerintah Daerah
 - a) Mengembangkan kapasitas kepemimpinan daerah agar lebih adaptif, komunikatif, dan inovatif dalam memperjuangkan kebutuhan masyarakat.
 - b) Memperkuat mekanisme kolaborasi dengan sektor swasta, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil guna menciptakan ekosistem pembangunan yang berkelanjutan.
- 3) Bagi Pemerintah Pusat
 - a) Menyusun skema dukungan fiskal yang lebih responsif terhadap program pengabdian masyarakat di daerah, terutama pada wilayah yang memiliki keterbatasan APBD.
 - b) Meningkatkan koordinasi lintas kementerian agar mekanisme bantuan ke daerah lebih terintegrasi dan tidak tumpang tindih.
- 4) Bagi Masyarakat dan Pemangku Kepentingan Lokal

- a) Terus memperkuat partisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pengabdian masyarakat agar kebutuhan lokal benar-benar terakomodasi.
- b) Menjalin kemitraan aktif dengan pemerintah daerah sehingga keberlanjutan program tidak hanya bergantung pada anggaran pemerintah, tetapi juga pada gotong royong berbagai pihak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan penelitian ini. Ucapan terima kasih secara khusus ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah memberikan informasi, data, serta kesempatan untuk melakukan observasi lapangan. Penghargaan juga diberikan kepada tokoh masyarakat, pelaku UMKM, kelompok tani, serta organisasi lokal yang turut berpartisipasi dalam wawancara dan diskusi, sehingga memperkaya data dan temuan penelitian. Tidak lupa penulis berterima kasih kepada rekan-rekan akademisi dan pihak perguruan tinggi yang memberikan masukan konstruktif dalam proses perumusan kerangka teori dan analisis. Dukungan dari berbagai pihak inilah yang menjadikan penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2020). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Antara News. (2023, Juni 14). Wakil Bupati Kulon Progo dorong optimalisasi program pengabdian masyarakat di tengah keterbatasan anggaran. *Antara News Yogyakarta*. <https://yogya.antaranews.com>
- Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Bloomberg, L. (2014). Public value governance: Moving beyond traditional public administration and the New Public Management. *Public Administration Review*, 74(4), 445–456. <https://doi.org/10.1111/puar.12238>
- Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE.
- Herlina, N., & Puspitasari, D. (2020). Strategi kepemimpinan kepala daerah dalam menjaga keberlanjutan program pembangunan di era keterbatasan fiskal. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 12(2), 115–130. <https://doi.org/10.21009/jip.122.05>
- Humas Kulon Progo. (2022, Desember 10). Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tingkatkan kolaborasi dengan pemerintah pusat dalam mendukung pembangunan daerah. *Portal Resmi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo*. <https://kulonprogokab.go.id>
- Kompas.com. (2023, Agustus 21). Efisiensi anggaran daerah: Tantangan dan strategi kepala daerah di era pasca pandemi. *Kompas.com*. <https://www.kompas.com>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE.
- Nasution, M. (2021). Kepemimpinan transformasional dalam pemerintahan daerah: Studi kasus efektivitas kebijakan publik. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 12(2), 115–128. <https://doi.org/10.21009/jip.122.05>
- Nasution, M. (2021). Kepemimpinan transformasional dalam pemerintahan daerah: Studi kasus efektivitas kebijakan publik. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 11(1), 33–47. <https://doi.org/10.25077/jian.11.1.33-47.2021>
- Purnomo, V. D. (2023). The Role of Karang Taruna in the Development of Youth Groups in Bendungan Village, Kulon Progo Regency. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH)*, 2(1), 105–116.
- Putnam, R. D. (1993). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton: Princeton University Press.
- Republika. (2023, Oktober 5). Kolaborasi pemerintah pusat dan daerah sebagai solusi keberlanjutan program publik. *Republika Online*. <https://www.republika.co.id>

- Setiawan, B. (2019). Partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan desa: Analisis kolaborasi pemerintah daerah dan masyarakat. *Jurnal Bina Praja*, 15(2), 97-108. <https://doi.org/10.21787/jbp.15.2019.97-108>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surya, D., & Hidayat, R. (2022). Efisiensi anggaran dan tantangan keberlanjutan program pelayanan publik di daerah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(1), 45-59. <https://doi.org/10.22146/jkp.13.1.45>
- Tempo. (2022, November 17). Peran wakil bupati dalam memperjuangkan program pembangunan berbasis masyarakat. *Tempo.co*. <https://www.tempo.co>
- Winarno, B. (2017). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.